

## IMPLEMENTASI *COUNTRY STRATEGIC PLAN (CSP)* OLEH *WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)* DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI DJIBOUTI TAHUN 2020 – 2022

Alfica Trisni Yuniasti<sup>1</sup>  
Aisyah<sup>2</sup>

**Abstract:** *The food crisis is one of the challenges for developing countries, one of which is Djibouti. The World Food Programme (WFP) as an international food organization, provides assistance to Djibouti by implementing the Country Strategic Plan (CSP) from 2020 to 2022 to address hunger and food security. This study aims to describe how the implementation of CSP uses the concept of food security as an analysis tool. This study uses a qualitative analysis method. The data sources consist of primary and secondary data collected through literature studies. The results of this study show that from 2020 to 2022 the implementation of CSP was achieved with three strategic outcomes. First, increasing food security and nutrition for vulnerable populations in Djibouti, especially children and pregnant women. Second, strengthening the capacity of the government and local communities for food access in managing food security and nutrition programs. Third, improving the logistics system and supply chain to ensure efficient and timely food distribution. The success of CSP implementation can be seen in the decrease in the number of affected communities, despite obstacles such as limited resources, dependence on international donors, and disruptions due to the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Food Crisis, Djibouti, Country Strategic Plan, WFP*

### Pendahuluan

*Food and Agriculture Organization (FAO)* mendefinisikan krisis pangan sebagai situasi dimana suatu wilayah tidak memiliki ketersediaan terhadap pangan yang memadai, baik secara material maupun ekonomi (FAO, 2022). Fenomena ini telah menjadi perhatian global, dengan laporan *Food Security Information Network* menunjukkan bahwa jumlah individu terdampak krisis pangan meningkat dari 108 juta pada tahun 2016 menjadi 193 juta pada tahun 2021. Salah satu negara yang mengalami dampak signifikan dari krisis pangan adalah Djibouti.

Djibouti merupakan sebuah negara kecil di Tanduk Afrika dengan luas 23.200 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 1 juta jiwa, yang memiliki lokasi strategis di jalur perdagangan internasional (Bereketeab, 2016). Namun, karakteristik geografisnya yang didominasi gurun dan wilayah berbatu membatasi kapasitas pertanian lokal (IFAD, n.d). Kekeringan juga terus memburuk sejak 2006, membuat semakin berkurangnya area padang rumput untuk menggembala dan menyebabkan kematian hewan ternak (WFP, 2022).

Dari total luas lahan, hanya kurang dari 1000 km<sup>2</sup> yang tergolong subur, dengan biaya tinggi untuk irigasi pertanian. Petani menggunakan pompa mesin diesel yang biaya operasionalnya mencapai USD 1.700 per hektar per tahun (Sougal et al., 2009).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : [alficatrismi02@gmail.com](mailto:alficatrismi02@gmail.com).

Aisyah.aisyah@fisip.unul.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : [aisyah.aisyah@fisip.unul.ac.id](mailto:aisyah.aisyah@fisip.unul.ac.id)

Kondisi ini menyebabkan harga pangan dalam negeri menjadi tinggi, dengan jumlah panen yang terbatas. Produksi pangan domestik Djibouti hanya memenuhi kurang dari 10% kebutuhan nasional, sehingga negara ini sangat bergantung pada impor untuk 90% bahan pangan pokok (WFP, 2023). Pemerintah Djibouti bergantung sepenuhnya pada impor bahan pangan pokok seperti gandum dari tahun 2000 hingga 2018, termasuk jagung, beras, dan tepung terigu (FAO, 2022).

Faktor penyebab krisis pangan di Djibouti selanjutnya adalah wabah belalang gurun. Belalang gurun dikenal sebagai salah satu hama paling merusak di dunia karena memakan segala jenis tumbuhan hijau dalam jumlah besar (Chuyanwan, 2022). Belalang gurun menjadi penyebab utama kerawanan pangan pada tahun 2020 pada 20,2 juta orang di Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Djibouti. Akibat hama belalang ini, tanaman pertanian masyarakat rusak dan gagal panen secara besar-besaran (FSIN, 2021). FAO melaporkan seluruh tanaman sayuran dan pakan ternak di wilayah Ali Sabieh dan Dikhil rusak pada Desember 2019. Hingga pada Januari 2020, serangan belalang gurun terus berlanjut, merusak lebih dari 80% dari 1.700 lahan agropastoral di 23 lokasi produksi di seluruh Djibouti, serta kurang lebih 5.000 hektar padang rumput telah dipenuhi oleh belalang gurun. Kerusakan tersebut berdampak pada ketahanan pangan lebih dari 26.700 orang di wilayah pedesaan Djibouti, dimana 70% dari populasi tersebut adalah petani dan peternak (FAO, 2020).

Pemerintah Djibouti yang mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya mendapatkan efek dari terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memperparah situasi dengan gangguan pada rantai pasok global dan kenaikan harga pangan, yang membuat 79% rumah tangga Djibouti mengalami kesulitan mengakses bahan pangan seperti beras dan gandum pada tahun 2020. Akibat dari sulitnya distribusi ini pun beberapa wilayah Djibouti seperti Balbala produk pangan pokok seperti beras dan gandum tidak tersedia. (World Bank, 2020).

Faktor lainnya yang turut memengaruhi krisis pangan di Djibouti adalah terjadinya fluktuasi harga dan sumber pendapatan tidak menentu yang membatasi akses terhadap pangan di negara yang sangat bergantung pada impor asing (IPC, 2015). Situasi tersebut khususnya terjadi ketika periode inflasi antara tahun 2007 hingga 2017, mengakibatkan harga pasar tidak dapat kembali normal (IPC, 2019).

*Global Report on Food Crises* menempatkan Djibouti pada urutan ke-23 sebagai negara dengan tingkat krisis pangan akut karena terjadi malnutrisi dan kelaparan. Masyarakat yang terdampak rawan pangan akut terus berfluktuasi sepanjang tahun 2015 (lebih dari 145 ribu jiwa) hingga 2022 (lebih dari 192 ribu jiwa) (FAO, 2022). Pada tahun 2020 masyarakat Djibouti diperkirakan hanya mencapai harapan hidup berkisar 53 tahun (WFP, 2021).

Situasi di Djibouti mencerminkan krisis berkepanjangan yang harus dihadapi oleh organisasi bantuan kemanusiaan seperti *World Food Programme* (WFP). WFP di Djibouti sebelumnya telah memiliki berbagai upaya seperti *Protracted Relief and Recovery Operation* (PRRO) periode 2015 hingga 2017, dan *Transitional Interim Country Strategic Plan* (T-ICSP) periode 2018 hingga 2019. Permasalahan diatas menjadi pertimbangan WFP untuk melanjutkan intervensi dan mendorong implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) Djibouti, yang akhirnya CSP Djibouti diberlakukan selama periode 5 tahun yaitu tahun 2020 hingga 2024.

## Kerangka Konseptual

### Konsep Keamanan Pangan

Konsep keamanan pangan merujuk pada terjemahan dari *food security*, yang di Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai ketahanan pangan (Kinan & Yulianti, 2023). *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dimana setiap individu, setiap waktu, memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bernutrisi untuk pemenuhan kebutuhan makanan serta preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 1996).

FAO membagi komponen dalam keamanan pangan menjadi empat dimensi yaitu:

a. Ketersediaan Pangan (*Food Availability*)

Dimensi ketersediaan pangan atau *food availability* mengacu pada tersedianya jumlah pangan yang cukup dengan kualitas yang baik, yang disuplai dari produk dalam negeri atau impor (termasuk bantuan pangan). Hal ini berkaitan dengan kemampuan negara untuk memproduksi atau mengimpor pangan sehingga mencukupi seluruh kebutuhan setiap penduduk.

b. Akses Pangan (*Food Access*)

Dimensi akses pangan atau *food access* merupakan kemampuan setiap individu untuk memperoleh sumber daya yang memadai (hak) untuk memperoleh makanan yang bergizi. Hak ini didefinisikan sebagai kumpulan seluruh komoditas yang dapat diperoleh seseorang mengingat peraturan hukum, politik, ekonomi dan sosial dalam komunitas tempat mereka tinggal (termasuk hak tradisional seperti akses ke sumber daya umum).

c. Pemanfaatan Pangan (*Utilization*)

Dimensi pemanfaatan pangan atau *utilization* berarti penggunaan pangan melalui pola yang memadai seperti air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan untuk mencapai keadaan kesejahteraan gizi dimana semua kebutuhan fisiologis dapat terpenuhi. Hal ini menekankan pentingnya menyertakan non-pangan dalam keamanan pangan, termasuk layanan kesehatan yang memadai.

d. Stabilitas (*Stability*)

Dimensi stabilitas atau *stability* menunjukkan untuk mencapai keamanan pangan baik dalam skala populasi, rumah tangga, atau individu maka harus memiliki akses yang memadai terhadap pangan setiap saat. Setiap orang tidak boleh menghadapi resiko kehilangan akses pangan akibat dari kondisi tiba-tiba (misalnya, krisis ekonomi atau bencana akibat iklim) maupun peristiwa siklus atau berulang (misalnya, ketidakamanan pangan musiman) (FAO, 2008).

Jika dilihat melalui konsep Keamanan Pangan, dapat dijelaskan bahwa berbagai permasalahan pemicu terjadinya krisis pangan mendorong WFP sebagai organisasi program pangan memberikan bantuan secara langsung. Salah satu bantuan WFP adalah *Country Strategic Plan*, strategi ini bertujuan untuk memberikan respon yang lebih terfokus, berkelanjutan terhadap tantangan keamanan pangan dan gizi di negara yang bersangkutan, serta memberikan fleksibilitas untuk merespon keadaan darurat. Pembentukan CSP dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai program dan intervensi bantuan pangan agar lebih efektif dan efisien (WFP, 2016).

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana WFP memberikan bantuan untuk mengatasi krisis pangan di Djibouti melalui *Country*

*Strategic Plan* (CSP) tahun 2020 hingga 2022. Adapun sumber data dalam penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari pihak utama yaitu WFP dan data sekunder melalui studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, dokumen, laman web resmi, dan sumber relevan lainnya. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pemilahan data, dan mengubah data menjadi sebuah informasi yang mampu memberikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Djibouti untuk menangani krisis pangan, namun mereka masih terkendala oleh keterbatasan dana dan sumber daya, termasuk beban hutang yang berat, serta koordinasi yang perlu ditingkatkan. Sehingga Djibouti masih membutuhkan bantuan dari *World Food Programme* (WFP). WFP memberikan bantuan melalui implementasi *Country Strategic Plan* periode 5 tahun (2020 hingga 2024), yang saat ini telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 hingga 2022.

### **Krisis Pangan di Djibouti**

Djibouti memiliki posisi strategis di Tanduk Afrika, namun kondisi geografi yang didominasi gurun dan wilayah berbatu menyebabkan keterbatasan dalam kapasitas pertanian dan produksi pangan lokal (IFAD, n.d). Dengan curah hujan yang sangat rendah, rata-rata hanya 130 mm per tahun, Djibouti termasuk salah satu negara paling kering di dunia (World Bank, 2022). Akibatnya, produksi pertanian dan peternakan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, di mana hasil produksi sayuran pada tahun 2020 hanya mencapai 36,3 ribu ton, mengalami tren penurunan rata-rata 2% per tahun sejak 2017. Selain itu, sektor perikanan menghasilkan 2.000 ton ikan pada 2019, yang dianggap dapat menjadi peluang untuk dikembangkan (Musa, 2023).

Djibouti sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanan negara terhadap guncangan eksternal, termasuk lonjakan harga pangan dan bahan bakar (IFAD, n.d). Misalnya, krisis ekonomi global pada 2008 dan lonjakan harga minyak pada 2011 menyebabkan harga pangan tidak kembali stabil (IPC, 2019). Pengadaan pangan pokok seperti gandum, jagung, dan beras 100% mengandalkan impor sejak tahun 2000 hingga 2018 (FAO, 2022).

Kondisi semakin memburuk akibat perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Pada akhir 2019, Djibouti mengalami curah hujan ekstrem hingga 336 mm dalam empat hari, setara dengan jumlah rata-rata selama dua tahun (Chuyanwan, 2022). Kondisi ini meningkatkan risiko banjir dan wabah hama (Salih et al, 2020). Terutama belalang gurun, yang merusak ratusan ribu hektar lahan pertanian di lima negara, termasuk Djibouti (Sokame et al., 2024).

Pandemi COVID-19 pada 2020 memperburuk krisis pangan dengan mengganggu distribusi global, menaikkan harga pangan, dan mengurangi akses masyarakat terhadap makanan bernutrisi. Pada akhir 2020, sekitar 155.000 orang (14% populasi) mengalami kerawanan pangan akut (IPC, 2021), yang meningkat menjadi 194.000 orang (17% populasi) pada 2021, terutama di wilayah Ali-Sabieh, Arta, Dikhil, Obock, dan Tadjourah (IPC, 2021). Selain itu, 79% rumah tangga mengalami kesulitan membeli bahan pangan pokok seperti sayuran, tepung, dan minyak goreng karena kelangkaan dan harga tinggi (World Bank, 2020).

Pemerintah Djibouti telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi krisis pangan dan kemiskinan, seperti *Strategic Framework for Poverty Reduction* (PRSP) dan *National Initiative for Social Development* (INDS) 2008-2015, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, akses layanan kesehatan, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial (WFP, 2015). Selain itu, melalui Visi Djibouti 2035, pemerintah menargetkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi di bawah pilar *Strengthening Human Capital*. Namun, implementasi strategi ini menghadapi kendala seperti beban utang yang tinggi dan koordinasi yang belum optimal, sehingga bantuan dari organisasi internasional seperti *World Food Programme* (WFP) menjadi krusial (WFP, 2020).

### **World Food programme (WFP) di Djibouti**

*World Food Programme* (WFP) berperan penting dalam menangani kerawanan pangan global, termasuk di Djibouti. Sejak didirikan pada 1960 dan menjadi bagian tetap PBB pada 1965, WFP telah beroperasi di lebih dari 120 negara, menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak konflik, bencana, dan perubahan iklim (WFP, 2022). WFP berada di Djibouti sejak tahun 1978, satu tahun setelah Djibouti mendapat kemerdekaannya pada 27 Juni 1977, dengan fokus pada perlindungan sosial, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan ketahanan pangan. Strategi dalam perencanaan ketahanan pangan perlu dirancang melalui inovasi, evaluasi berkelanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi (Maxwell, 2001). Oleh karena itu program WFP terus berkembang menyesuaikan dengan tantangan yang ada (WFP, 2022). Di Djibouti, WFP sebelumnya mengimplementasikan berbagai strategi ketahanan pangan, termasuk *Protracted Relief and Recovery Operation* (PRRO) dan *Transitional Interim Country Strategic Plan* (T-ICSP), yang kemudian dilanjutkan dengan *Country Strategic Plan* (CSP).

#### **a. *Protracted Relief and Recovery Operation* (PRRO) Tahun 2015–2017**

PRRO atau Operasi Djibouti 200824 dimulai pada awal Mei 2015 hingga Desember 2017. PRRO merupakan program bantuan pertama di Djibouti dengan pembukuan sistematis yang lengkap dengan tema “*Enhancing the resilience of chronically vulnerable rural, urban and refugee populations and reducing undernutrition in Djibouti*”. Dalam *Executive Summary* PRRO, WFP menyebutkan tema tersebut berasal dari masalah domestik seperti minimnya produksi pertanian akibat kurangnya akses air untuk kegiatan agropastoral akibat perubahan iklim, yang diperburuk oleh kurangnya layanan dasar yang memadai (WFP, 2015).

PRRO memiliki tiga tujuan utama: (1) mengurangi stunting pada anak di bawah dua tahun, (2) memastikan akses pangan sepanjang tahun, dan (3) meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani kecil. Tiga hasil strategis PRRO sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi melalui distribusi bantuan pangan dan uang tunai bagi pengungsi di kamp Ali Addeh dan Holl Holl guna meningkatkan daya beli dan ekonomi lokal.
- 2) Akses pangan bagi masyarakat rentan melalui implementasi program ketahanan pangan, penciptaan aset, serta transfer tunai saat musim paceklik di wilayah rawan seperti Obock dan Dikhil.

- 3) Penurunan malnutrisi melalui intervensi bagi ibu dan anak melalui program perbaikan gizi, pengobatan malnutrisi akut, dan strategi komunikasi perubahan perilaku.

Meskipun program ini membantu mengatasi kerawanan pangan, evaluasi menunjukkan beberapa tantangan, termasuk keterbatasan pendanaan, ketergantungan komunitas terhadap bantuan, serta perlunya penguatan kapasitas lokal dan efisiensi distribusi. Menindaklanjuti hal ini, WFP merancang *Transitional Interim Country Strategic Plan* (T-ICSP) sebagai strategi lanjutan sambil merumuskan *Country Strategic Plan* (CSP) untuk strategi jangka panjang.

b. *Transitional Interim Country Strategic Plan* (T-ICSP) Tahun 2018 – 2019

*Transitional Interim Country Strategic Plan* (T-ICSP) atau Rencana Strategis Negara Transisi Sementara untuk Djibouti, diimplementasikan pada Januari 2018 hingga Juni 2019. Selama fase transisi ini, WFP berupaya untuk tetap berkomitmen mempertahankan kapasitas bantuan kemanusiaannya sambil lebih mengarahkan perhatian kepada aspek-aspek kunci seperti perlindungan sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan keamanan pangan (WFP, 2020). WFP dalam T-ICSP memiliki lima hasil strategis yang diterapkan meliputi:

- 1) Pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di kamp di Republik Djibouti memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun.
- 2) Kerawanan pangan penduduk pedesaan dan perkotaan Djibouti di wilayah dan lingkungan yang menjadi sasaran mengalami peningkatan akses terhadap pangan pada tahun 2019.
- 3) Anak usia sekolah di pedesaan Djibouti memiliki akses terhadap makanan bergizi selama tahun sekolah.
- 4) Populasi rentan seperti anak usia 6-59 bulan, ibu hamil dan menyusui, dan pasien ART (*Antiretroviral Therapy*, pengobatan untuk orang yang hidup dengan HIV/AIDS) dan TBC (Tuberkulosis) yang kurang gizi sudah meningkatkan status gizi di sepanjang tahun.
- 5) Komunitas kemanusiaan di *Horn of Africa* menerima, atas permintaan, keahlian, pelayanan dan infrastruktur di kawasan rantai pasokan sepanjang tahun.

Evaluasi strategi transisi ini menunjukkan beberapa tantangan, seperti keterbatasan pendanaan dan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. WFP merekomendasikan penguatan strategi pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengintegrasikan bantuan pangan dengan intervensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar perencanaan *Country Strategic Plan* (CSP) Djibouti ke depan.

c. *Country Strategic Plan* (CSP) Tahun 2020 - 2024

*Country Strategic Plan* (CSP) merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh WFP untuk mengoptimalkan efektivitas bantuan pangan di suatu negara. CSP bertujuan untuk memberikan respons yang lebih terfokus, berkelanjutan, dan fleksibel dalam menangani tantangan keamanan pangan dan gizi, terutama dalam menghadapi kondisi darurat yang tidak terduga (WFP, 2016). CSP menggantikan beberapa kategori program yang sebelumnya telah dimiliki oleh WFP untuk mendorong efektivitas dan seluruh bantuan di bawah WFP akan terfokus pada pembukuan dan rancangan yang serupa. Program tersebut tercantum pada *General Regulations* WFP dalam *General Rules II.2* yaitu kategori program *Emergency*

*Operation (EMOP), Protracted relief and recovery operations (PRROs), Development programmes comprise country programmes (CPs) and development projects (DEVs), dan Special operations (SOs) (WFP, 2014).*

CSP Djibouti sendiri dirancang sebagai program 5 tahunan dan didasarkan pada evaluasi strategi terdahulu seperti T-ICSP, diselaraskan dengan *Vision Djibouti 2035*, strategi regional Uni Afrika (Agenda 2063 dan Deklarasi Malabo), serta prioritas pembangunan nasional. Perumusan CSP juga didasarkan pada *Zero Hunger Strategic Review (ZHSR)* yang mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, seperti rendahnya kapasitas pertanian, ketergantungan pada sektor peternakan yang terdampak perubahan iklim, harga pangan yang tinggi akibat biaya produksi dan impor, serta kesenjangan gender yang menghambat pengentasan kelaparan (WFP, 2019).

Sebagai respons terhadap tantangan disusun setidaknya tujuh poin utama intervensi yang akan dilakukan oleh WFP yaitu, perlindungan sosial, penguatan kapasitas dan dukungan teknis, intervensi nutrisi, advokasi program, respon perubahan iklim, kapasitas logistik, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (WFP, 2020). Tujuh poin tersebut membentuk 6 aktivitas kunci yaitu:

- 1) Memberikan bantuan pangan, layanan gizi, dan pendidikan pada pencari suaka yang tinggal di pemukiman dan pengungsi.
- 2) Memperkuat kapasitas pemerintah dan mendukung respon nasional terhadap masyarakat yang terkena dampak guncangan melalui rencana darurat.
- 3) Menyediakan makanan, bantuan tunai dan bantuan teknis untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional yang inklusif, responsif gender, adaptif dan peka terhadap gizi yang berkontribusi pada integrasi ekonomi.
- 4) Memberikan pencegahan dan pengobatan malnutrisi, bantuan tunai, makanan bergizi, konseling dan insentif gizi untuk populasi sasaran sambil mendukung program gizi nasional.
- 5) Menyediakan layanan rantai pasokan atau *supply chain* kepada komunitas kemanusiaan.
- 6) Memberikan pelatihan kejuruan dan penguatan kapasitas di sektor transportasi dan penanganan komoditas bagi mitra, pengungsi, dan penduduk lokal

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, CSP telah diimplementasikan melalui berbagai program yang berkontribusi langsung terhadap upaya ketahanan pangan dan kerawanan gizi di Djibouti. Implementasi setiap program ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya, yang akan menguraikan implementasi serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya sepanjang 2020 hingga 2022.

### **Implementasi *Country Strategic Plan (CSP)* untuk Menangani Krisis Pangan di Djibouti pada Tahun 2020 – 2022**

Pada awal periode implementasi CSP, Djibouti menghadapi tantangan dalam keamanan pangan yang disebabkan oleh kombinasi faktor tidak terduga yaitu invasi belalang gurun dan pandemi Covid-19. Akibatnya, CSP Djibouti yang telah disahkan pada September 2019 mengalami berbagai revisi pada tahun 2020, hal ini disesuaikan dengan fleksibilitas strategi dalam menangani guncangan. Kondisi ini sesuai dengan kemampuan adaptasi terhadap keadaan yang sering berubah yang diperlukan secara bertahap, dan perumusan kebijakan mendasar oleh organisasi internasional yang krusial (Maxwell & Slatter, 2003).

Pemerintah Djibouti secara khusus meminta WFP untuk meningkatkan respons terhadap pandemi dan memberikan bantuan kepada migran di fasilitas karantina pada April 2020. Permintaan ini memicu Revisi Anggaran CSP Djibouti yang sudah disetujui, hal ini memungkinkan WFP untuk meningkatkan intervensi untuk berfokus menangani pandemi (WFP, 2021). Revisi mencakup perubahan modalitas bantuan menjadi lebih banyak dalam bentuk barang, duplikasi sistem distribusi sebagai program pemerintah, dan penyesuaian implementasi program-program dengan mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi resiko Covid-19.

Implementasi CSP Djibouti dibagi ke dalam tiga tujuan hasil strategis dengan enam aktivitas utama dalam mencapai keamanan pangan. Hasil strategis pertama berfokus pada peningkatan keamanan pangan dan gizi bagi populasi rentan, terutama anak-anak dan ibu hamil. Hasil strategis dua berfokus untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan komunitas lokal terhadap akses pangan dalam mengelola program keamanan pangan dan gizi. Hasil strategis tiga, berfokus pada peningkatan sistem logistik dan rantai pasokan untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan tepat waktu.

### **Meningkatkan Keamanan Pangan dan Gizi**

Strategi pertama berfokus pada peningkatan keamanan pangan dan gizi bagi populasi rentan di Djibouti, terutama anak-anak dan ibu hamil. Untuk mencapai hasil strategis tersebut CSP memiliki dua aktivitas kunci. Aktivitas pertama, yaitu program *cash based transfer* (CBT) dan layanan nutrisi, program *Moderate Acute Malnutrition* (MAM), peluncuran *System for Cash-based Operations and Programme Enhancement* (SCOPE), dan proyek percontohan hidroponik. Aktivitas kedua, dicapai melalui proyek *Forecast-based Financing* (FbF), dan program voucher dan makanan tambahan.

#### a) *Cash Based Transfer* (CBT) dan layanan nutrisi

Program bantuan pangan dan layanan gizi yang dilaksanakan oleh WFP mencakup berbagai skema, termasuk transfer tunai berbasis kebutuhan (*Cash-Based Transfer/CBT*) dan layanan nutrisi. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi dan masyarakat terdampak melalui distribusi tunai serta konseling gizi bulanan. Selama periode 2020–2022, jumlah penerima manfaat mencapai 26.396 orang pada 2020, 23.400 orang pada 2021, dan 24.807 orang pada 2022. Selain itu, WFP juga memberikan dukungan kepada 600 migran di Aour-Awssa serta 1.000 migran transit dengan bantuan pangan. Program yang diimplementasikan merupakan upaya WFP dalam memenuhi kebutuhan pangan bernutrisi bagi pengungsi yang mengalami kesulitan akses pangan.

#### b) Program *Moderate Acute Malnutrition* (MAM)

Dalam upaya menangani malnutrisi akut sedang (*Moderate Acute Malnutrition/MAM*), program ini memberikan makanan tambahan khusus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia 6-59 bulan, serta konseling praktik gizi yang dipantau oleh tenaga kesehatan. Pada 2021, WFP menyediakan 170 ton makanan bergizi yang menjangkau 3.113 penerima manfaat. Namun, program ini hanya berjalan selama kuartal pertama tahun tersebut akibat keterbatasan dana. Program-program ini diukur dengan standar indikator dimensi pemanfaatan dalam *food security*, memastikan setiap anak mendapatkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, menjaga kesehatan ibu hamil, dan mengatasi defisiensi nutrisi (FAO, 2020).

c) Peluncuran *System for Cash-based Operations and Programme Enhancement* (SCOPE).

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan, WFP meluncurkan SCOPE di kamp pengungsian Markazi pada 2020. Sistem ini merupakan percontohan pertama yang kemudian diperluas ke seluruh kamp pengungsian. Pada 2021 jumlah individu terdaftar mencapai 20.727 dan pada 2022 penggunaan SCOPE diperluas untuk masyarakat lokal dan negara intervensi WFP lainnya. Selain itu, sistem ini memungkinkan WFP untuk melacak pembelian dan penggunaan dana bantuan secara rinci, memastikan bantuan mencapai mereka yang membutuhkannya sesuai kebutuhan.

d) Proyek percontohan hidroponik

Sebagai bagian dari inovasi dalam ketahanan pangan, WFP juga mengimplementasikan proyek percontohan hidroponik di 21 sekolah pada 2020, termasuk cara easak hasil panen segar dan menjaga nilai gizi. Program ini bekerja sama dengan UNICEF dan FAO untuk meningkatkan ketahanan pangan serta edukasi gizi bagi anak-anak sekolah. Namun, keterbatasan pendanaan dan pengalihan priorotas untuk penanganan pandemi menyebabkan proyek ini hanya berjalan selama kuartal pertama 2020.

e) Proyek *Forecast-based Financing* (FbF)

Dalam upaya memperkuat kapasitas pemerintah dan respons nasional terhadap krisis, WFP mengembangkan mekanisme antisipatif bencana berbasis prediksi iklim yaitu *Forecast-based Financing* (FbF). WFP bekerja sama dengan SEGRC dan Badan Meteorologi Djibouti pada 2020 untuk mengembangkan sistem yang aman. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak buruk iklim dan mendorong keamanan perlu dilakukan dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan (Verschuuren, 2016). Namun, pada 2021, proyek ini mengalami penundaan akibat fokus utama pemerintah yang beralih pada penanganan pengungsi dari Ethiopia. Pada 2022, proyek dilanjutkan dengan pengembangan sistem prediksi iklim panas dan hujan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

f) Program voucher dan makanan tambahan

Program voucher makanan adalah inisiatif di mana penerima manfaat menerima voucher yang dapat ditukarkan dengan makanan di 24 toko pengecer yang telah ditunjuk WFP. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap pangan dengan memberikan fleksibilitas kepada penerima manfaat untuk memilih makanan sesuai kebutuhan mereka. Program ini mengalami peningkatan penerima manfaat dari 6.000 rumah tangga pada 2020 menjadi 47.000 penerima pada 2022, termasuk 3.800 anak-anak serta ibu hamil dan menyusui.

Implementasi berbagai program ini menunjukkan komitmen WFP dalam menangani ketahanan pangan dan gizi di Djibouti. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan pendanaan dan prioritas darurat, WFP tetap berupaya untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **Memperkuat Kapasitas Pemerintah dan Komunitas Lokal**

Strategi kedua berfokus untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan komunitas lokal terhadap akses pangan dalam mengelola program keamanan pangan dan gizi. Untuk mencapai hasil strategis tersebut terdapat dua aktivitas lanjutan dari hasil

strategis sebelumnya yaitu aktivitas tiga dan aktivitas empat. Aktivitas ketiga yaitu menyediakan makanan, bantuan tunai dan bantuan teknis untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional yang inklusif, responsif gender, adaptif dan peka terhadap gizi yang berkontribusi pada peningkatan integrasi ekonomi. Aktivitas keempat yaitu, memberikan pencegahan dan pengobatan malnutrisi, bantuan tunai, makanan bergizi, konseling dan insentif gizi untuk populasi sasaran sambil mendukung program gizi nasional.

a) Program Solidaritas Keluarga Nasional (PNSF)

PNSF merupakan inisiatif pemerintah Djibouti yang dikelola oleh Kementerian Urusan Sosial dan Solidaritas (MASS) dengan dukungan operasional dari WFP. Program ini memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin di kawasan perkotaan dengan nilai USD 45 per bulan melalui voucher elektronik yang dapat digunakan di toko-toko yang bermitra dengan WFP. Selama periode 2020-2021, program ini menjangkau 4.000 rumah tangga, menghasilkan injeksi ekonomi lokal sebesar USD 1,32 juta. Pada tahun 2022, PNSF berfokus pada integrasi 1.000 rumah tangga sangat miskin ke dalam program perlindungan sosial nasional guna memastikan keberlanjutan dukungan bagi kelompok yang paling rentan.

b) *Comprehensive Refugee Response Framework* (CRRF)

Program CRRF bertujuan untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam jaringan perlindungan sosial nasional. Implementasi CRRF dilakukan dalam tiga tahap utama: penyediaan bantuan pangan untuk kelompok rentan pada tahun 2020, perluasan cakupan bantuan tunai pada tahun 2021, serta integrasi pengungsi ke dalam sistem kesehatan dan perlindungan sosial nasional pada tahun 2022. Sepanjang periode 2020-2022, program ini berhasil memberikan bantuan kepada 2.500 rumah tangga pengungsi di Kota Djibouti, serta menjadi percontohan bagi pengembangan skema perlindungan sosial yang lebih inklusif di negara tersebut.

c) Program mata pencaharian

Untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, WFP bekerja sama dengan MASS dalam menyelenggarakan program mata pencaharian pada tahun 2022. Program ini memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, konstruksi, dan literasi keuangan kepada 400 peserta. Selain itu, program ini juga membantu peserta dalam mengakses pasar tenaga kerja dan layanan *mikro-finance*. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta memberikan solusi jangka panjang bagi individu yang berada dalam kondisi rentan.

d) *Food Assistance for Assets* (FFA)

Program FFA berfokus pada penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan aset komunitas. Pada tahun 2020, progra ini menjangkau 12.570 penerima manfaat terutama petani kecil yg terdampak invasi belalang gurun dan rehabilitasi 20,5 hektar tanah akibat degradasi. Pada 2021 reboisasi 15 hektar mangrove, memperbaiki 17 kebun yang rusak akibat banjir, memberikan tempat tinggal 400 rumah tangga anggota komunitas nelayan, dan menyediakan sarana untuk melanjutkan produksi sayuran dan ternak untuk konsumsi pribadi. Pada tahun 2020, akses irigasi berhasil disediakan lebih murah melalui panel surya untuk 23 hektar perkebunan guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Program FFA berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap krisis pangan dan perubahan iklim.

e) *School Meal Programme* (SMP)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi siswa serta mendukung keberlanjutan pendidikan. Pada tahun 2020, SMP menjangkau 18.294 anak sebelum pembatasan sekolah akibat pandemi COVID-19. Untuk memastikan kesinambungan program, pada tahun 2021-2022 WFP berfokus pada peningkatan infrastruktur dengan menyediakan 80 kompor hemat energi dan membangun 40 tempat penyimpanan makanan di sekolah-sekolah yang terlibat dalam program ini. Hal ini menunjukkan upaya WFP dalam memperkuat sistem makan sekolah yang lebih berkelanjutan dan mandiri di Djibouti.

f) Program pencegahan dan pengobatan malnutrisi

Program ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi malnutrisi akut dengan menyediakan makanan bergizi, bantuan tunai, serta layanan konseling gizi bagi populasi rentan. Sepanjang 2020-2022, WFP menjangkau 12.500 individu di daerah dengan prevalensi malnutrisi akut global di atas 14%, serta mendistribusikan 380 ton makanan khusus. Meskipun keterbatasan anggaran menyebabkan pergeseran fokus dari pencegahan ke pengobatan pada tahun 2021-2022, program ini tetap memberikan dukungan upaya nasional dalam menangani malnutrisi.

g) Program penyuluhan ibu hamil dan menyusui

Penyuluhan mengenai gizi, menyusui, dan vaksinasi untuk ibu hamil dan menyusui hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 2020. Program ini mengedukasi ibu mengenai gizi dan langkah-langkah penting dalam menyusui serta vaksinasi, meskipun data tentang tingkat default, mortalitas, dan pemulihan di pusat kesehatan terbatas.

Distribusi seluruh bantuan pada hasil strategis dua ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pasokan makanan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka sesuai dengan dimensi food security, terutama dalam kondisi harga pangan fluktuatif naik saat pandemi. Kondisi keamanan pangan selalu berkaitan dengan kondisi stabilitas harga pangan, khususnya makanan pokok (Simatupang, 1999). Bantuan yang diutamakan diberikan kepada kelompok rentan dengan gizi buruk bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat.

### **Meningkatkan Sistem Logistik dan Rantai Pasokan**

Strategi ketiga berfokus pada optimalisasi sistem logistik dan rantai pasokan guna memastikan distribusi pangan yang efisien dan tepat waktu. Strategi ini diproyeksikan dalam aktivitas lima yaitu penyediaan layanan rantai pasokan melalui *Humanitarian Logistic Base* (HLB) dan didukung oleh aktivitas enam yaitu program pelatihan kejuruan guna memperkuat kapasitas di sektor logistik.

HLB Djibouti memainkan peran strategis dalam mendukung operasi kemanusiaan di kawasan Tanduk Afrika. Tujuan layanan HLB ini akan memperkuat upaya untuk memenuhi kriteria keamanan dari indikator pangan khususnya dimensi *availability* (ketersediaan). Sebagai pusat logistik utama, HLB Djibouti memastikan bahwa infrastruktur logistik tetap beroperasi selama krisis, menjaga stabilitas suplai pangan, serta mengurangi risiko kekurangan pangan secara mendadak. Terdapat empat pilar utama dalam layanan HLB Djibouti sebagai berikut:

1) Layanan Koridor

Mencakup seluruh aktivitas logistik untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan melalui jalur darat dan laut. HLB Djibouti berperan dalam pembongkaran

kapal, penyimpanan sementara, dan pengelolaan pengiriman ke berbagai negara di Tanduk Afrika.

#### 2) Layanan Silo

Menyediakan fasilitas penyimpanan biji-bijian dalam jumlah besar dengan sistem pengendalian hama yang efektif guna menjaga kualitas pangan. Layanan ini memastikan bahwa pangan yang diterima bebas dari hama dan kualitasnya terjaga, yang penting untuk pemanfaatan pangan yang baik dan mencegah kekurangan gizi seperti anemia dan defisit vitamin. Pilar ini mendukung keamanan pangan dengan memastikan ketersediaan energi dan protein dari biji-bijian dan tanaman umbi-umbian dalam kondisi baik hingga distribusi diberikan kepada setiap individu yang menjadi sasaran bantuan kemanusiaan.

#### 3) *Bilateral Service Provision* (BSP)

Menyediakan layanan logistik khusus bagi mitra kemanusiaan seperti organisasi PBB dan LSM, termasuk pengelolaan proses bea cukai dan penyediaan ruang penyimpanan. BSP membantu mengurangi biaya logistik dan mempercepat distribusi, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada harga pangan domestik dan meningkatkan akses terhadap pangan

#### 4) Pembangunan Kapasitas

Meningkatkan kemampuan logistik melalui pelatihan dan pengembangan *Supply Chain Centre of Excellence* guna memperkuat jaringan logistik regional.

Implementasi HLB Djibouti menunjukkan peningkatan kapasitas penanganan kargo setiap tahunnya. Pada tahun 2020, WFP menangani 245.000 ton kargo, yang meningkat drastis hingga 950.466 ton pada 2021, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 552.542 ton pada tahun 2022. Selain itu, jumlah truk yang digunakan dalam operasi logistik juga meningkat, mencapai lebih dari 22.000 truk pada 2021 dan 11.487 truk pada 2022.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi rantai pasokan, WFP juga menginisiasi program pelatihan kejuruan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor logistik. Program ini ditujukan bagi mitra, pengungsi, dan masyarakat lokal guna meningkatkan daya beli serta akses terhadap pangan. Sepanjang periode 2020-2022, program ini berhasil melatih lebih dari 1.200 peserta dalam bidang logistik, transportasi, dan keterampilan bea cukai. Pada 2021, WFP menambahkan pelatihan keterampilan forklift dan inventaris, serta memberikan sertifikasi yang memungkinkan peserta untuk memasuki pasar kerja. Selain itu, program ini juga mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dalam sektor logistik, memastikan kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja. Pada akhir 2022, program pelatihan ini mulai diintegrasikan ke dalam Strategi dua untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Implementasi strategi logistik ini tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional WFP, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas politik dan ekonomi di wilayah yang menerima bantuan. HLB Djibouti menjadi titik sentral dalam rantai pasokan regional, memungkinkan distribusi pangan yang lebih cepat dan efektif ke Ethiopia, Sudan Selatan, Yaman, dan Somalia.

Peningkatan kapasitas logistik yang dilakukan melalui pelatihan kejuruan juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, WFP membantu meningkatkan peluang kerja dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Implementasi program tersebut menunjukkan bagaimana optimalisasi rantai pasokan

dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan regional.

### **Kesimpulan**

WFP telah mengimplementasikan *Country Strategic Plan* (CSP) untuk menangani krisis pangan di Djibouti selama periode 2020 hingga 2022. WFP mengimplementasikan berbagai program dan mencapai tiga hasil strategis. Hasil strategis satu dicapai dengan melaksanakan program bantuan pangan dan layanan nutrisi, program MAM, program voucher dan makanan tambahan, proyek FbF yang dimulai pada 2020 (sempat terhenti pada 2021 akibat perubahan fokus kegiatan), hingga peluncuran SCOPE lebih awal untuk kebutuhan distribusi yang lebih aman saat pandemi. Hasil strategis dua dicapai melalui program solidaritas keluarga nasional (PNSF), melaksanakan *comprehensive refugee response framework* (CRRF), *school meal programme* (SMP) yang berhasil dijadikan sebagai program nasional pada tahun 2020, program pencegahan dan pengobatan malnutrisi, program penyuluhan ibu hamil dan menyusui (dilaksanakan satu kali pada 2020), dan program mata pencaharian sebagai program tambahan pada tahun 2022. Hasil strategis tiga, untuk meningkatkan sistem logistik dan rantai pasok dicapai melalui dua program yaitu, penyediaan layanan *supply chain* melalui *Humanitarian Logistic Base* (HLB) dan program pelatihan kejuruan yang sempat mengalami penundaan akibat pembatasan namun dapat diimplementasikan kembali sepanjang tahun 2022.

### **Daftar Pustaka**

- Bereketeab, R. (2016). Djibouti: Strategic Location, an Asset or a Curse?. *Journal of African Foreign Affairs*, 3(1/2), 5–18. <https://www.jstor.org/stable/26661713>
- Chuyanwan. (2022). Desert Locust Risk Mapping: Monitor Past Data and Predict the Future. <https://storymaps.arcgis.com/stories/f07f6eb7a70c420f854d7f8c6a206253>.
- FAO. (2008). An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. Food Security Information for Action: Practical Guides. [https://www.fao.org/fileadmin/user\\_upload/eufao-fsi4dm/docs/concepts\\_guide.pdf](https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/concepts_guide.pdf).
- FSIN. (2021). Global Report on Food Crises 2021. <https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/Full%20report.pdf>.
- FSIN. (2022). Global Report on Food Crises (GRFC) 2022. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cd91dde3-e05b-48b3-b8c1-c93497a1d78f/content>.
- Govt Djibouti & FAO. (2020). Appeal to the international community : Desert Locust Invasion in Republic of Djibouti. <https://reliefweb.int/report/djibouti/2020-appeal-international-community-desert-locust-invasion-republic-djibouti>.
- International Fund for Agricultural Development. (nd.). Djibouti. IFAD. <https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/djibouti>.
- IPC. (2019). Djibouti: Chronic Food Insecurity Situation 2018 - 2022. <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151999/?iso3=DJI>.
- Kinan, A., Yulianti, D. (2023). Upaya Indonesia Menjaga Keamanan Pangan (Food Security) melalui Paris Agreement of Climate Change. *Indonesian Perspective*, 8(2), 263-285.

- Maxwell, S. (2001). *Organizational Issues in Food Security Planning*. In S. Devereux & S. Maxwell (Eds.), *Food Security in Sub-Saharan Africa*. London: ITDG.
- Maxwell, S., & Slater, R. (2003). Food Policy Old and New. *Development Policy Review*, 21(5-6), 531–553. doi:10.1111/j.1467-8659.2003.00222.
- Musa, Y. (2023). Djibouti agriculture: production, export, import. *The Global Tribune*. 3<sup>rd</sup> September. <https://globaltribune.net/djibouti-agriculture-production-export-import>.
- Salih, A.A.M., Baraibar, M., Mwangi, K.K. et al. (2020). Climate change and locust outbreak in East Africa. *Nature Climate Change*, 10, 584–585. <https://www.nature.com/articles/s41558-020-0835-8>.
- Simatupang, P. (1999). Toward Sustainable Food Security: The Need for A New Paradigm. In P. Simatupang et al. (Eds.), *Indonesia's Economic Crisis: Effects on Agriculture and Policy Responses*. *Centre for International Economic Studies*. Australia: University of Adelaide.
- Sokame, B.M., Agboka, K.M., Kimathi, E., Mudereri, B.T., Abdel-Rahman, E.M., Landman, T., Rwaheru, M. M., Abdalla, O., Mafabi, M. M., Lubango, L. M., & Tonnang, H. E. Z. (2024). An Integrated Assessment Approach for Socio-Economic Implications of the Desert Locust in Eastern Africa. *Earth's Future*, 12(4), e2023EF003841. <https://doi.org/10.1029/2023EF003841>.
- Sougal, A. Pon, B., Bates, M., Peterson, A. (2009). *Irrigated Agriculture in Djibouti: An Economic and Physical Analysis of Irrigation Systems*. *D-Lab Spring*. <https://silo.tips/download/irrigated-agriculture-in-djibouti-an-economic-and-physical-analysis-of-irrigatio>
- WFP. (2019-2023). *WFP Djibouti Annual Country Report 2019-2022*. <https://www.wfp.org/publications/annual-country-reports-djibouti>.
- WFP. (2022). Horn Africa Extreme Drought Deepens Hunger Region Beset Conflict. <https://www.wfp.org/stories/horn-africa-extreme-drought-deepens-hunger-region-beset-conflict>.
- WFP. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) Report - 2023*. <https://www.wfp.org/publications/state-food-security-and-nutrition-world-sofi-report-2023>.
- World Bank. (2020). *DJ-Rural Community Development and Water Mobilization Project (PRODERMO)*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/152011593403171994/text/Djibouti-Rural-Community-Development-and-Water-Mobilization-Project.txt>.
- World Bank. (2022). *Country Data: Djibouti*. <https://data.worldbank.org/country/DJ>.